

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil yang telah dikemukakan pada BAB V sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Preferensi Para Elite

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, para elite di tingkat Kabupaten telah menunjukkan preferensi mereka dalam memilih dan menentukan alternatif bagi persoalan yang dialami masyarakat di wilayah Kecamatan Cibal sesuai dengan pandangan mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada implikasi/keterlibat dari semua kelompok elite dalam proses formulasi/penetapan kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal dalam Forum OPD, dengan menggunakan berbagai pertimbangan untuk memutuskan kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal. Namun kebijakan yang telah dibuat para elite tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, karena masih ada masyarakat yang mempersoalkan usulan mereka yang tidak ditindak lanjuti. Dalam hal ini kelompok elite hanya mengutamakan usulan dari desa-desa dalam wilayah Kecamatan Cibal yang secara dominan telah memilih mereka menjadi pemimpin. Selain itu, kelompok elite tersebut juga melakukan kunjungan kerja terhadap wilayah-wilayah dalam Kecamatan Cibal yang usulannya belum terjawab, dengan tujuan untuk menarik simpati dan kepercayaan masyarakat agar mempertahankan kedudukan mereka sebagai kelompok penguasa dengan memberikan janji terhadap masyarakat bahwa untuk tahun berikutnya kendala yang dihadapi masyarakat akan segera

teratasi. Akan tetapi sampai dengan saat ini, 40 usulan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal tersebut belum ditindak lanjuti.

2. Adanya Administrator Publik Sebagai Mediator Kebijakan

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, yang menjadi mediator kebijakan/penyalur informasi mengenai program-program pembangunan yang akan dijalankan di wilayah Kecamatan Cibal terhadap masyarakat adalah pejabat pemerintah Kecamatan Cibal. Hal tersebut dapat dilihat dari peran yang dijalankan pejabat pemerintah Kecamatan Cibal dalam menyalurkan informasi berupa sebaran proyek pembangunan yang telah ditetapkan para elite di tingkat Kabupaten kepadamasyarakat melalui setiap Kepala Desa/Kelurahan dan melalui papan informasi yang berisi proyek pembangunan di wilayah Kecamatan Cibal. Selain itu juga, para pejabat pemerintah Kecamatan Cibal telah memahami dengan baik tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Dengan begitu, maka para pejabat pemerintah Kecamatan dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih kurang paham dengan kebijakan yang telah dibuat.

3. Kebijakan Publik Tidak Menggambarkan Kepentingan Publik

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, kebijakan yang dihasilkan seharusnya dapat mengatasi segala bentuk keluhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan Cibal. Akan tetapi kebijakan yang dihasilkan sama sekali belum menggambarkan kepentingan publik/masyarakat banyak. Hal ini terbukti dari tanggapan masyarakat pada beberapa bidang meliputi:

- 1) Bidang pendidikan, yang mengusulkan penambahan ruangan kelas pada SDI Rado dan pembangunan jamban/toilet pada SMPN 3 Cibal. Namun hingga saat ini kedua usulan tersebut belum terjawab. Meskipun kelompok elite telah

melakukan kunjungan kerja secara langsung, tetapi tidak membawa perubahan sama sekali. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik yaitu, siswa-siswi SDI Rado harus melakukan kegiatan belajar-mengajar menggunakan jadwal yang telah ditentukan oleh tenaga pendidik mereka yaitu, sebagian mengikuti kegiatan belajar-mengajar di pagi hari dan sebagian lagi di sore hari. Sedangkan siswa-siswi beserta tenaga pendidik mereka pada SMPN 3 Cibal harus meminjam toilet pada rumah masyarakat sekitar sekolah, saat hendak buang air kecil/besar, dan bahkan tidak sedikit jumlah dari siswa-siswi yang sering buang air kecil disembarang tempat meski telah ditegur. Maka dari itu, kedua pihak ini sangat mengharapkan para elite di tingkat Kabupaten dapat memperhatikan usulan mereka dan segera mencairkan solusinya.

- 2) Bidang kesehatan, yaitu Puskesmas Pagal yang mengusulkan pembangunan ruangan bersalin serta ruang nifas, dan Puskesmas Beamese yang mengusulkan pengadaan kendaraan kesehatan/ambulance. Sampai saat ini juga kedua usulan dari bidang kesehatan ini belum diperhatikan dan terjawab. Hal ini memberikan dampak yang buruk sekali, yaitu Puskesmas Pagal tidak dapat memberikan pelayanan kepada ibu-ibu yang hendak bersalin dan dengan terpaksa harus mengambil tindakan untuk merujuk pasien ke RSUD Ben Mboi Ruteng menggunakan ambulance dengan menempuh jarak 22 km. Kemudian pada Puskesmas Beamese sangat kewalahan dalam hal emergency, yaitu saat ada pasien gawat darurat yang harus segera dirujuk, petugas kesehatan harus terlebih dahulu mencari kendaraan umum atau bahkan meminjam kendaraan pribadi masyarakat sekitar Puskesmas untuk merujuk pasien gawat darurat tersebut menuju RSUD Ben Mboi Ruteng dengan menempuh jarak 31 km. Kedua pihak dari bidang kesehatan ini sangat mengharapkan, agar pihak Kabupaten yang

memiliki kewenangan untuk merealisasikan usulan mereka segera memperhatikan hal kemudian memenuhi apa yang mereka butuhkan untuk mendukung kesehatan dan keselamatan orang banyak.

- 3) Bidang pertanian, yaitu kelompok tani yang mengusulkan rehabilitasi jalan usaha tani/jalan pertanian, untuk mempermudah transportasi mereka menuju lahan pertanian dan untuk memperlancar mobilisasi mulai dari pengangkutan peralatan pertanian, bibit, pupuk serta hasil panen mereka. Akan tetapi usulan mereka sama sekali belum mendapatkan jawaban. Hal ini memberikan dampak yang buruk pada kelompok tani, yaitu mereka harus membuang tenaga ekstra tiap harinya untuk berjalan kaki menuju lokasi persawahan dan terjadi kenaikan harga dalam proses pengangkutan hasil panen dari Rp.250.000 menjadi Rp.300.000. Pemilik kendaraan angkut hasil panen memberikan alasan kondisi jalan yang rusak membuat onderdil kendaraan banyak yang rusak, sehingga biayanya dinaikan.

Selain itu, masyarakat pada masing-masing bidang diatas juga mengeluhkan hal yang sama yaitu pembangunan setiap tahunnya hanya memprioritaskan usulan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan saja. Pada kenyataannya, masalah pembangunan di wilayahh Kecamatan Cibal bukan hanya soal infrastruktur jalan saja tetapi berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan masih banyak lagi yang selama ini diabaikan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa saran dan masukan yang diberikan dengan tujuan membangun dan

memperbaiki formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal kedepannya, meliputi :

- 1) Dalam proses perumusan kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, para elite harus lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam memahami permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan sebaik mungkin, agar semua usulan yang benar-benar bersifat urgensi itulah yang diutamakan untuk segera ditindak lanjuti. Kemudian kelompok elite harus bersikap secara adil dalam merealisasikan usulan-usulan semua masyarakat Kecamatan Cibal, dalam hal ini jangan hanya mengutamakan usulan dari wilayah-wilayah yang secara dominan saja telah memilih mereka menjadi pemimpin, tetapi harus memperhatikan usulan dari semua wilayah yang ada dalam Kecamatan Cibal.
- 2) Para elite harus memperhatikan secara keseluruhan semua usulan masyarakat yang ada dari berbagai bidang, dan tidak hanya terfokus pada satu masalah saja yaitu tentang infrastruktur jalan untuk menghindari terjadinya kesenjangan.
- 3) Segala usulan yang bersifat urgensi yang belum disepakati pada tahun sebelumnya akibat kendala pada anggaran, harus diprioritaskan dan segera dijalankan pada pembangunan tahun berikutnya agar masyarakat tidak merasa kewalahan lagi untuk mengusulkannya secara berulang kali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abidin, Said, Zainal. 2002/2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Panca Siwa.

AR.Mustopadidjaja.2002.*Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.

AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep,teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Abdal. 2015. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung.

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Washington DC.

Dunn, Willian, N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dunn, Willian, N. Juli 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dunn, William, N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan*.Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.

Eyestone, Robert. 1971. *The Threads Of Policy: A Study In Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.

Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Motte, Joseph. 2005. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di Kecamatan*.

Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexy. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdak
arya.

Mulyadi, D. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Narbuko, Cholid. Abu. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Parson, Wayne. 2011. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hatim Publishing.

Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Kerjasama UNPAD-IIP. Bandung

Setyanto, Widya.P.FFPM 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan*. Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sutojo. 2015. *Good Corporate Governance*. Jakrta: PT Damar Mulia Pustaka.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, cv.

Theresia, Aprillia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. bandung: Alfabeta.

Wahan, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi aksara.

Winarno, Budi Surachman. 2007. *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media pressindo.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

PeraturanPerundang-Undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007: *Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*.

UU RI Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

UU RI Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008. *Tentang Kecamatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. *Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Bupati Sopeng Nomor: 7. 2019. Pasal 8: *Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan*.

Sumber Lain

Bintari, Antik. 2016. Jurnal Ilmu Pemerintahan: *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Bumd Perseroan Terbatas*. Jakarta: Vol.2, No.2.

Karsidi, Ravik. 2018. *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan: Beberapa Teori Kebijakan Publik*.

Motte, Joseph. 2005. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang*. Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mas Halimah, Ayi Karyana. 2017. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik: *Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan*.

Ramdhani, Adullah. 2017. Jurnal Publik: *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Universitas Garut: Vol.11, No.01.

Yuliani, Febri, dkk. Jurnal Ilmu Administrasi Negara: *Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD*. Universitas Riau: Vo.16, No.01.

PEDOMAN WAWANCARA

I. PENJELASAN UMUM

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah berkaitan dengan tugas akhir.
2. Semua jawaban responden menyangkut masalah dalam penelitian ini dijamin kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak manapun.
3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara jujur dan benar.
4. Atas kesediaan dari bapak/ibu/saudara/i yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya peneliti mengucapkan limpah terimakasih.

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama:

Jenis Kelamin:

Umur:

Pendidikan :

Pekerjaan:

Jabatan :

Alamat :

III. DAFTAR PERTANYAAN

1. Preferensi Para Elit

- 1) Bagaimana bentuk implikasi/keterlibatan Bapak/Ibu dalam proses formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ?

- 2) Apakah saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam menetapkan kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mengatasi semua permasalahan riil ditengah masyarakat ?
- 4) Apakah terdapat kendala/hambatan dalam proses perumusan kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ?
- 5) Mengapa masih banyak daftar program usulan hasil Musrenbang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai yang tidak diakomodir dan direalisasikan ?

2. Adanya Administrator Publik Sebagai Pengantar Kebijakan Publik

- 1) Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjaditujuan dan sasaran dari program-program pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbangcam ?
- 2) Siapa saja yang berperan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang dimuat dalam berita acara hasil Musrenbangcam menuju tingkat Kabupaten?
- 3) Bagaimana proses/mekanisme yang Bapak gunakan untuk menyalurkan/menginformasikan program-program pembangunan yang akan dijalankan maupun tidak dijalankan kepada masyarakat ?
- 4) Mengapa masih banyak daftarprogram usulan hasil MusrenbangKecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai yang tidak diakomodir dan direalisasikan ?
- 5) Apakah daftar program usulan hasil Musrenbang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai yang belum direalisasi dapat menjadi program priotas untuk pembangunan kedepannya ?
- 6) Apakah luaran (output) kebijakan telah sesuai dengan harapan masyarakat ?

3. Kebijakan Publik Tidak Menggambarkan Kepentingan Publik

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah program-program pembangunan yang telah diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai hasil

dari perumusan kebijakan dapat mengatasi semua permasalahan riil yang ada di wilayah Kecamatan Cibal?

- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah kecamatan sudah transparan dalam menyampaikan informasi terkait program-program pembangunan yang akan dijalankan maupun yang tidak dijalankan berdasarkan hasil kebijakan yang telah ditetapkan?
- 3) Apakah program-program pembangunan yang dijalankan di wilayah Kecamatan Cibal sudah sesuai dengan program-program pembangunan yang diusulkan saat Musrenbangcam berlangsung ?
- 4) Apa harapan dari Bapak/Ibu untuk pembangunan wilayah Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai untuk kedepannya ?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ket: Foto bersama Wakil Bupati Kabupaten Manggarai setelah proses interview.



Ket:Foto bersama Ketua DPRD Kabupaten Manggarai setelah proses interview.



Ket: Foto bersama Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Manggarai setelah proses interview.



Ket: Foto bersama Camat Cibal setelah proses interview.



Ket: Foto bersama Kepala Desa Nenusetelah proses interview.



Ket: Foto bersama Guru SDI Rado setelah proses interview.



Ket: Foto bersama Guru SMPN 3 Cibal setelah proses interview.



Ket: Foto bersama Ibu Bidan Puskesmas Pagal setelah proses interview.



Ket: Foto bersama Ibu Bidan Puskesmas Beamese setelah proses interview.



Ket: Foto bersama petani di Desa Nenu setelah proses interview.



Ket: Foto bersama petani di Desa Golo Ncuang setelah proses interview.



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52, Telp. (0380) 833395, Fax. 831194

Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 53/WM.H5 FISIP/N/IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

**"MODEL ELITE DALAM FORMULASI KEBIJAKAN HASIL
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KECAMATAN CIBAL, KABUPATEN MANGGARAI"** atas nama:

Nama	: Natanael Lavisier Ludi
Nomor Registrasi	: 421 18 105
Prodi.	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas	: Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Kecamatan Cibal,
Kabupaten Manggarai**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Kupang, 05 April 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. Marianus Kleden, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Nakolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/1235/DPMPTSP.4.3/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Natanael Laviser Ludi
NIM : 42118105
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : MODEL ELITE DALAM FORMULASI KEBIJAKAN HASIL MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN
CIBAL KABUPATEN MANGGARAI

Lokasi Penelitian : Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 13 April 2022
b. Berakhir : 06 Mei 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 April 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi NTT,


Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196508081995031003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Yos Sudarso No. 14, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong

IZIN PENELITIAN
No : 503/DPMTSP/879/IP/IV/2022

Berdasarkan : Surat Pengantar dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 070/1235/DPMTSP.4.3/04/2022 Tanggal 05 April 2022;
Perihal : Permohonan Izin Penelitian;
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin Penelitian.
Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ini memberikan :
IZIN PENELITIAN

Kepada:

Nama : Natanael Laviser Ludi
NIM : 42118105
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/ Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Publik

Untuk melakukan penelitian di :

Judul : " Model Elite Dalam Formulasi Kebijakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai "
Lokasi : Kecamatan Cibai, Kab. Manggarai
Lama Penelitian : 13 April 2022 s/d 06 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai;
5. Izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan peninjauan Kembali sebagaimana mestinya.

Ruteng, 12 April 2022



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, f

Robertus Syukur, S.Fil

Pembina

NIP. 19690821 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KANTOR KECAMATAN CIBAL
Jln. No. Telp. Pagal

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : KCC.423.4/61.a/IV/2022

Dasar : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Nomor : 503/DPMPTSP/879/IP/IV/2022 tanggal 5 April 2022 perihal Izin Penelitian;

Dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **NATANAEL LAVISER LUDI**
NIM : 42118105
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk melaksanakan penelitian di :

Lokasi : Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai
Judul Penelitian : **"Model Elite Dalam Formulasi Kebijakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai"**
Pengikut : -
Lama Penelitian : Terhitung mulai tanggal 13 April s.d 06 Mei 2022.

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Kepala Desa setempat;
2. Selama melaksanakan kegiatan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapatkan tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Pagal, 13 April 2022


Drs. Henry F. Makanoneng
PEMBINA TK. I
NIP. 19740707 199311 1 001

Tembusan : dh. disampaikan kepada;

1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KANTOR KECAMATAN CIBAL
Pagal

SURAT KETERANGAN

Nomor : KcC.423.a/115/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKUS JEN, S.Sos
NIP : 19810612 201001 1 029
Pangkat/Gol. : PENATA Tk. I.
Jabatan : SEKERTARIS CAMAT CIBAL

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NATANAEL LAVISER LUDI
NIM : 42118105
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pagal, RT/RW: 005/002
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

----- Telah Melaksanakan Kegiatan Penelitian -----

Lokasi : Kantor Kecamatan Cibal
Lama Penelitian : 13 April s/d 06 Mei 2022
Judul Penelitian : "Model Elite Dalam Formulasi Kebijakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagal, 06 Mei 2022



FRANSISKUS JEN, S.Sos
NIP. 19810612 201001 1 029

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah & Tenaga Kerja Kab. Manggarai di Ruteng;
4. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Manggarai di Ruteng;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang ;
6. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Yos Sudarso No. 14, Kel. Mbaumu, Kec. Langke Rembong

**SURAT KETERANGAN
SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 503/DPMPTSP/1461/SP/V/2022

Memperhatikan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Sekcam Cibal, Nomor : KcC.423.a/115/V/2022 tanggal 06 Mei 2022.

Maka dengan ini menerangkan :

Nama	: Natanael Laviser Ludi
Pekerjaan	: Mahasiswi
NIM	: 42118105
Universitas	: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Alamat Universitas	: Jl. Jend. Achmad Yani No. 50-52 Kupang - NTT

Benar-benar telah menyelesaikan penelitian dengan judul "**Model Elite Dalam Formulasi Kebijakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai**", terhitung tanggal 13 April 2022 s/d 06 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ruteng, 30 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai,

Robertus Srukur, S.Pd

Pemimpin

NIP. 19640821 199903 1007

Tembusan :

1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang
3. Yang Bersangkutan di Tempat.

